

BAB III

PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN SOEKARNO (1945-1966)

Pelaksanaan Politik Luar Negeri di Indonesia merupakan pelaksanaan dari rencana politik dan pelaksanaan kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Pada pembahasan Bab ini akan dibahas mengenai latar belakang pelaksanaan Politik Luar Negeri di Indonesia, kondisi politik awal kemerdekaan di Indonesia, Politik Luar Negeri Indonesia pada masa RIS dan Demokrasi liberal, dan kondisi pemerintahan pada masa demokrasi terpimpin. Politik Luar Negeri merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalin hubungan dengan Negara lain. Indonesia sebagai Negara yang baru merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 tentunya perlu untuk menjalin kerjasama dengan luar negeri dalam rangka membangun bangsa.

A. Kabinet Parlementer Pada Masa Pemerintahan Soekarno

Pemerintahan pada masa Demokrasi Parlementer dijalankan oleh tujuh kabinet dengan masa jabatan berbeda. Ketujuh kabinet itu adalah Kabinet Natsir dengan masa jabatan antara 6 September 1950 ±18 April 1951, Kabinet Sukiman dengan masa jabatan antara 26 April 1951 ±26 April 1952, Kabinet Wilopo dengan masa jabatan antara 19 Maret 1952 ±2 Juni 1953, Kabinet Ali Sastroamidjojo I dengan masa jabatan antara 31 Juli 1953 ±24 Juli 1955, Kabinet Burhanuddin Harahap dengan masa jabatan antara 12 Agustus 1955 ±3 Maret 1956, Kabinet Ali Sastroamidjojo II dengan masa jabatan antara 24 Maret 1956 ±14 Maret 1957, dan Kabinet Djuanda (Kabinet Karya) dengan masa jabatan antara 9 April 1957 ±10 Juli 1959 (Matroji, 2002: 69-70). Adapun beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh ketujuh kabinet tersebut, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban rakyat, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, mempersiapkan dan menyelenggarakan Pemilu, menyelesaikan masalah dan memperjuangkan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia, dan melaksanakan Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif. Selain itu, pada masa Demokrasi Parlementer ini juga dibentuk konstituante, sebuah lembaga yang bertugas untuk menyusun dan menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) baru bagi Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem yang dianut oleh bangsa Indonesia pada tahun 1949-1959 adalah sistem demokrasi Liberal yaitu sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas (dari proses perwakilan atau langsung) diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi.

Pada kabinet pertama belum memiliki Menteri Pertahanan, dan fungsi Kementerian Pertahanan Negara ada di dalam Kementerian Keamanan Rakyat, yang dipimpin oleh Menteri Keamanan Rakyat, yakni mantan SodanchoSuprijadi. Sebagaimana diketahui bahwa Suprijadi tidak pernah menduduki posisi sebagai Menhan dan selanjutnya posisi Menhan digantikan oleh Sulyadikusumo sebagai Menteri ad interim pada 20 Oktober 1945.

Pada masa kabinet Sjahrir ke-1 yaitu periode 14 November 1945-12 Maret 1946 fungsi pertahanan Negara juga masih berada di bawah wewenang Menteri Keamanan Rakyat, yang dijabat oleh Mr. Amir Sjarifuddin. Namun pada kabinet Sjahrir ke-2 periode 12 Maret – 2 Oktober 1946, dibentuk Kementerian Pertahanan yang dijabat oleh Mr. Amir Sjarifuddin. Di dalam kabinet ini fungsi pertahanan keamanan mulai ditekankan.

Dalam Perjalanannya, jabatan Menteri Pertahanan sering dijabat rangkap oleh satu orang, seperti PM Amir Sjarifuddin pada kabinetnya (3 Juli – 11 November 1947), yang menunjukkan betapa pentingnya fungsi pertahanan Negara dalam menghadapi beragam konflik yang terjadi pada saat itu. Pada periode Kabinet Hatta ke-1 periode 29 Januari 1948 – 4 Agustus 1949, saat Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dalam keadaan darurat akibat tekanan tentara Belanda, Wapres Drs. Moh. Hatta merangkap sebagai Menteri Pertahanan ad interim. Namun pada 15 Juli 1949 jabatan Menhan dipegang oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Sri Sultan juga menjabat Menhan pada masa Kabinet Hatta ke-2 dan Kabinet Republik Indonesia Serikat hingga 6 September 1950, dan kemudian menjabat lagi pada beberapa kabinet berikutnya hingga mundur atas permintaan sendiri pada 2 Juni 1953. Pada kabinet Pembangunan I di Era Orde Baru, mulai 6 Juni 1968 jabatan Menteri Pertahanan Keamanan dirangkap Persiden RI Jenderal TNI Soeharto.

B. Kondisi Politik Indonesia Periode Awal Kemerdekaan (1945-1949)

Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno yang didampingi oleh Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia. Pada masa awal-awal kemerdekaan, arah kebijakan Politik Luar Negeri dan diplomasi Indonesia lebih ditujukan untuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi dan menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia (Wuryandari, 2008). Agenda Politik Luar Negeri Indonesia pada saat itu lebih banyak ditentukan oleh kepentingan politik domestik, daripada semata-mata mengikuti tekanan lingkungan internasional (Wuryandari, 2008). Hal ini dikarenakan Indonesia adalah sebuah Negara yang baru merdeka yang belum secara penuh mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Negara-Negara di dunia. Sedangkan syarat suatu Negara diakui sebagai suatu Negara yang berdaulat penuh adalah mendapatkan pengakuan dari Negara-Negara di dunia bahwa Negara tersebut adalah sebuah Negara baru yang telah merdeka dan berdaulat.

Orientasi kebijakan Indonesia pada saat itu adalah mempertahankan kedaulatan dan membentuk otoritas Negara itu sendiri, sambil menata kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Soekarno sebagai aktor sentral (dalam hal ini berperan sebagai seorang presiden) berusaha memainkan peranannya sebagai seorang nasionalis sejati yang mempertahankan keutuhan bangsa dan Negeranya. Sejak Bung Hatta menyampaikan pidatonya berjudul "Mendajung Antara Dua Karang" (1948), Indonesia menganut Politik Luar Negeri bebas-aktif yang dipahami sebagai sikap dasar Indonesia yang menolak masuk dalam salah satu blok Negara-Negara superpower, menentang pembangunan pangkalan militer asing di dalam negeri, serta menolak terlibat dalam pakta pertahanan Negara-Negara besar. Namun, Indonesia tetap berusaha aktif terlibat dalam setiap upaya meredakan ketegangan di dunia internasional.

Politik Luar Negeri RI yang bebas dan aktif itu dapat diartikan sebagai kebijaksanaan dan tindakan-tindakan yang diambil atau sengaja tidak diambil oleh Pemerintah dalam hubungannya dengan Negara-Negara asing atau organisasi-organisasi internasional dan regional yang diarahkan untuk tercapainya tujuan nasional bangsa (Jusuf, 1989). Politik Luar Negeri Bebas Aktif inilah yang kemudian menjadi prinsip dalam pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia pada masa pemerintahan selanjutnya. Tentunya pelaksanaan

Politik Luar Negeri Bebas Aktif ini juga disesuaikan dengan konstelasi politik internasional pada saat itu. Politik Luar Negeri yang dijalankan oleh Soekarno pada masa awal kemerdekaan lebih bersifat High profile yang mengutamakan semboyan anti kolonialisme dan imperalisme. Pemerintahan Soeharto lebih mengutamakan pembangunan dan memperdulikan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, Soekarno memilih untuk menerapkan Politik Luar Negeri Bebas Aktif sehingga tidak mengganggu politik dalam negeri (Wuryandari, 2008).

Presiden Soekarno pada masa itu diasosiasikan dengan kelompok Negara-Negara komunis. Kedekatannya dengan para pemimpin Negara komunis menyebabkan kebijakan yang diterapkan pada masa pemerintahannya terkesan mendekati garis kiri dan Indonesia dikenal sebagai Negara yang bersahabat dengan Negara-Negara komunis. Soekarno punya agenda politik luas yang mencakup gagasan-gagasan kiri. Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno telah membawa Indonesia pada aliran arah kiri dengan Poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Pyongyang-Peking yang beliau buat. Poros ini kemudian menempatkan Indonesia pada posisi yang aneh di kalangan Negara- Negara Barat. Puncaknya adalah keluarnya Indonesia dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, Soekarno sendiri menyatakan bahwa dirinya bukan seorang komunis.

Konsep Politik Luar Negeri Indonesia yang Bebas Aktif merupakan gambaran dan usaha Indonesia untuk membantu terwujudnya perdamaian dunia. Salah satu implementasinya adalah keikutsertaan Indonesia dalam membentuk solidaritas bangsa-bangsa yang baru merdeka dalam forum Gerakan Non-Blok (*Non-Aligned Movement / NAM*). Forum ini merupakan refleksi atas terbaginya dunia menjadi dua kekuatan besar, yakni Blok Barat (Amerika) dan Blok Timur (Uni Soviet). Konsep Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif ini berusaha membantu bangsa-bangsa di dunia yang belum terlepas dari belenggu penjajah. Selain itu pada masa ini, konsep Politik Luar Negeri Indonesia cenderung berlawanan dengan konsep hegemoni Negara-Negara barat dalam bentuk kebijakan-kebijakan luar negeri Negara-Negara tersebut, khususnya Negara-Negara besar.

Prioritas utama Politik Luar Negeri dan diplomasi Indonesia pascakemerdekaan hingga tahun 1950an lebih ditujukan untuk menentang

segala macam bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk juga untuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi yang belum selesai di Indonesia, dan menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui Politik Bebas Aktifnya (Wuryandari, 2008). Usaha dekolonisasi yang dilakukan oleh pihak Belanda dan sekutu membuat Indonesia memberikan perhatian ekstra pada bagaimana mempertahankan kemerdekaan yang telah digapai dan diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Indonesia dituntut untuk cerdas dalam menentukan strategi agar kemerdekaan yang telah diraih tidak sia-sia.

Berkaitan dengan penggunaan instrumen Politik Luar Negeri, instrumen Politik Luar Negeri yang dominan digunakan pada masa pemerintahan Soekarno adalah diplomasi. Diplomasi ditempuh untuk memuluskan jalan Indonesia dalam mendapatkan pengakuan dari Negara-Negara di dunia akan kemerdekaannya. Selain itu, diplomasi juga dominan dipilih karena sesuai dengan konteks pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia yang berprinsip Bebas Aktif. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa cita-cita bangsa tidak mungkin dicapai tanpa diplomasi untuk memperoleh dukungan internasional (Wuryandari, 2008).

Strategi ganda Indonesia dalam menjalankan kebijakan luar negerinya pada masa revolusi di atas pada tingkatan tertentu menunjukkan ambivalensi. Pada satu sisi, pendekatan pertama melalui perjuangan fisik di atas jelas menunjukkan optimisme dan kepercayaan yang tinggi dari Indonesia bahwa Indonesia dengan kemampuannya sendiri bisa melawan kekuatan asing, khususnya dengan Belanda yang secara militer lebih kuat. Pada sisi lain, pendekatan yang juga menekankan pada diplomasi menggunakan bantuan pihak ketiga jugamenunjukkan sisi lemah dalam kebijakan luar negeri Indonesia (Wuryandari, 2008).

Suatu kebijakan dalam menentukan strategi politik tentunya memiliki hubungan dengan keadaan di dalam negeri. Suatu Negara akan menerapkan kebijakan yang lebih mengutamakan dan menguntungkan bagi Negara. Dalam menjalankan hubungan internasional suatu Negara dapat menerapkan kebijakan yang mengutamakan keadaan dalam negeri (ilham, 2020).

Pada masa Orde lama kebijakan luar negeri Indonesia dipengaruhi oleh semangat patriotisme pasca kolonial dan juga pada awal Perang Dingin ditingkat internasional. Pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, agenda

utama kebijakan luar negeri Indonesia, seperti halnya yang dilakukan oleh Negara lain didunia ini ketika baru memproklamirkan kemerdekaannya, adalah mencari pengakuan dari Negara-Negara lain didunia. Hal yang sama juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat itu sehingga fokus utama kebijakan luar negeri Indonesia saat itu diarahkan kepada upaya pencarian pengakuan dari Negara lain yang diikuti dengan pembukaan hubungan diplomatik dengan berbagai Negara di dunia.

C. Politik Luar Negeri Indonesia Periode RIS dan Demokrasi Liberal (1949-1959)

Sejak setelah diadakannya Konferensi Meja Bundar pada tanggal 23 Agustus 1949 di Den Hag, maka babak baru dalam pemerintahan Indonesia telah dimulai. Dalam hal ini sesuai dengan kesepakatan kedua Negara pada konferensi tersebut, system pemerintahan Indonesia haruslah berbentuk serikat. Yakni di mana dalam satu Negara terdapat Negara- Negara bagian di dalamnya.

Selanjutnya terkait dengan hubungan diplomatic kedua Negara tersebut, pemerintah Indonesia pada waktu itu mencoba menjalin hubungan baik dengan pemerintah Belanda. Hal yang dilakukan pemerintah Indonesia pada waktu juga merupakan satu usaha yang dilakukan guna mendapatkan kejelasan mengenai status dari Irian Barat yang masih dikuasai oleh pemerintah Belanda. Di mana salah satu isi kesepakatan dari KMB menyebutkan bahwa masalah Irian Barat akan diadakan perundingan tersendiri dalam waktu satu tahun setelah pengakuan kedaulatan atas RIS (Pramodya (2014)).

Akan tetapi hingga akhir tahun 1949, pemerintah Indonesia pun pada waktu itu belum mendapatkan kejelasan terkait masalah Irian Barat. Bahkan sampai pada kembalinya bentuk Negara Indonesia ke dalam bentuk Negara kesatuan, masalah Irian Barat pun belum terselesaikan. Kembalinya Negara Indonesia menjadi Negara Kesatuan yang didahului pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat pada tanggal 17 Agustus 1950, yang dimana dalam pembentukan Negara kesatuan tersebut bukan semata-mata kehendak dari pemerintah pada waktu itu akan tetapi adanya desakan dari sebagian besar rakyat Negara-Negara federal yang menghendaki agar Negara federal tersebut dibubarkan dan bergabung ke dalam Negara Republik Indonesia. Sehubungan dengan dibubarkannya Negara Republik Indonesia Serikat maka kabinet serta

segala bentuk kementerian yang berada di dalamnya juga ikut dibubarkan yang dimana pada waktu itu jalannya pemerintahan di dalam Republik Indonesia Serikat dipimpin oleh kabinet Moh. Hatta. Sehubungan dengan hal tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia pasca pembubaran RIS mengalami kekosongan kabinet dalam artian NKRI pada waktu itu belum memiliki seorang perdana menteri untuk menjalankan pemerintahan Negara.

Dalam hal ini NKRI pada awal kembalinya menganut sistem pemerintahan Demokrasi Parlementer yang dimana presiden hanya sebagai pemimpin Negara tapi yang menjalankan pemerintahan adalah seorang perdana menteri. Terkait dengan hal itu, pada masa awal dari kembalinya NKRI yakni dari tahun 1950-1959, terdapat tujuh kabinet yang pernah memimpin jalannya pemerintahan Negara Indonesia yakni, kabinet Natsir (7 September 1950-21 Maret 1951), kabinet Sukiman (27 April 1951-23 Februari 1952), kabinet Wilopo (3 April 1952-3 Juni 1953) dan kabinet Ali Sastroamidjojo I (1 Agustus 1953-24 Juli 1955), kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret 1956), kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956-4 Maret 1957) dan kabinet Djuanda (9 April 1957-10 Juli 1959) (Sudirman, 2014).

Pada masa Demokrasi Parlementer (1950-1959), merupakan sebuah masa dimana kedudukan partai politik sangatlah kuat. Dalam hal ini segala kebijakan yang akan diambil pada waktu itu tidak perlu melibatkan pemimpin Negara atau presiden, karena kedudukan presiden pada waktu itu hanyalah mengesahkan apa yang telah menjadi keputusan dari parlemen. Berbeda dengan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, dalam hal ini ia juga memiliki hak prerogatif dalam parlemen. Dimana hal tersebut sudah merupakan ciri-ciri dari sebuah sistem pemerintahan parlementer, dalam hal ini sebagai berikut :

- a. Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala Negara dikepalai oleh presiden atau raja.
- b. Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif, sedangkan presiden atau raja diseleksi berdasarkan undang-undang.
- c. Perdana menteri memiliki hak prerogatif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
- d. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.

- e. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
- f. Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.
- g. kontrol terhadap Negara, alokasi terhadap sumber daya alam dan manusia dapat terkontrol.
- h. Kelompok minoritas (agama, etnis) boleh berjuang untuk memperjuangkan dirinya.

Terkait dengan bentuk sistem pemerintahan yang bersifat Demokrasi Parleментар yang dimana seorang perdana menteri yang bertanggung jawab dalam hal pemerintahan sedangkan presiden hanya sebagai kepala Negara, maka dari itu pada tanggal 6 September 1950, secara resmi kabinet Natsir mulai memimpin jalannya pemerintahan NKRI.

D. Politik Luar Negeri Indonesia Periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Demokrasi terpimpin sendiri merupakan sebuah sistem pemerintahan yang dimana segala kebijakan dipusatkan kepada pemimpin Negara atau presiden yang dimana seorang presiden memiliki kekuasaan penuh dan tidak terbatas masanya atau yang biasa dikenal dengan istilah otokrasi. Dalam hal ini adapun yang menjadi ciri-ciri dari sistem pemerintahan demokrasi parlementer pada waktu itu menurut Sudirman (2011: 385) adalah:

- a. Dominasi presiden. Presiden Soekarno berperan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Terbatasnya peran partai politik.
- c. Meluasnya peran militer sebagai unsur politik.
- d. Berembangnya pengaruh partai komunis di Indonesia.

Berdasarkan ciri-ciri dari sistem pemerintahan demokrasi terpimpin tersebut, maka dari pada itu ada pun yang menjadi program kerja dari pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soekarno, adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan keamanan dalam negeri.
- b. Pembebasan Irian Barat.
- c. Melengkapi sandang pangan rakyat.

Terkait dengan beberapa program kerja yang akan dilakukan oleh kabinet kerja pimpinan Presiden Soekarno, maka dalam hal ini adapun yang menjadi perkembangan hubungan diplomatik Indonesai dengan Negara lain

sampai pada akhir tahun 1959 adalah adanya beberapa penandatanganan surat perjanjian perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan beberapa Negara.

Sehubungan dengan hal itu, adapun Negara-Negara yang melakukan hubungan diplomatik dengan Indonesia pada masa itu yakni Turkey dan Australia. dalam hal ini, penandatanganan perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan Turkey dilakukan di Ankara pada tanggal 14 September 1959. Sedangkan dengan pemerintah Australia dilakukan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 1959, yang dimana pada penandatanganan perjanjian waktu itu pemerintah Indonesia diwakili oleh Soewito Koesoemowidagdo sedangkan yang mewakili pemerintah Australia adalah L. R. Mc Intyre (Pusponegoro dan Notosusanto, 2012).

Terkait dengan perjanjian perdagangan yang dilakukan pada waktu itu, pemerintah Indonesia hanya mengandalkan hasil bumi untuk di tukarkan dengan barang-barang yang dimana di dalam negeri Indonesia sendiri belum bisa diproduksi. Berdasarkan dari beberapa perkembangan diplomatik yang dialami oleh Indonesia pada tahun 1960, dapat dilihat dari beberapa Negara yang menjadi tujuan kunjungan keNegaraan Indonesia sebagian besar memberikan dukungan terhadap pemerintah Indonesia terhadap usahanya untuk memasukkan Irian Barat dalam wilayah pemerintahan Republik Indonesia.

Kedekatan Indonesia dengan Negara-Negara komunis pada saat itu ternyata mempengaruhi agresivitas Politik Luar Negeri Indonesia. Hal ini tidak lepas dari faktor-faktor determinan yang mempengaruhi pola pembentukan kebijakan pelaksanaan Politik Luar Negeri. Faktor pertama, kondisi politik dalam negeri pasca proklamasi masih kurang stabil dan diwarnai pertentangan basis pencarian dan pemilihan ideologi Negara. Faktor kedua, kondisi ekonomi Indonesia yang sangat kacau dan terpuruk, di antaranya ditandai dengan inflasi yang sangat tinggi bahkan hingga mencapai 600%. Faktor ketiga, pengambilan keputusan pada saat itu bersifat sangat sentral dan sangat terpaku pada sosok kharismatik Soekarno. Soekarno menjadi tokoh andalan Indonesia dalam forum internasional, bahkan karena hal tersebut, Soekarno juga dinobatkan sebagai "Presiden Seumur Hidup" oleh rakyat Indonesia. Sentralisasi peran Soekarno ini juga yang akhirnya mendorong beliau melakukan pendekatan-pendekatan

“terpimpin” hingga akhirnya terbentuk Demokrasi Terpimpin Pancasila yang menggantikan Demokrasi Parlementer RIS. Faktor keempat, lingkungan internasional pada saat itu berada pada masa Perang Dingin, di mana dunia terbagi menjadi dua kekuatan besar, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Kepentingan Indonesia sendiri adalah dalam rangka menjaga dan memelihara integritas politik bangsa Indonesia yang baru merdeka sebagai fondasi bagi *nation-building* dan *state-building*. Di sinilah Indonesia menentukan posisinya dalam kerangka Politik Luar Negeri Bebas-Aktif.

Pada masa pemerintahan Soekarno, Indonesia telah memprakarsai dan mengambil sejumlah kebijakan luar negeri yang sangat penting dan monumental, seperti Konferensi Meja Bundar, Konferensi Asia Afrika, Konferensi Irian barat dan Malaysia, dan politik poros-porosan Jakarta- Peking-Hanoi-Phnom Penh-Pyong Yang. Kepentingan nasional yang paling utama ketika itu tidak lain adalah untuk memperoleh pengakuan internasional atas kedaulatan Negara Indonesia yang sudah diproklamasikan pada Agustus 1945 (Wuryandari, 2008).

Konferensi dan kebijakan tersebut merupakan wujud usaha yang dilakukan oleh pemerintahan Soekarno untuk mendapatkan pengakuan dari Negara lain. Namun, ada yang menilai bahwa konferensi dan kebijakan tersebut tidak murni untuk mencari dan mendapatkan pengakuan dari Negara lain, tetapi juga memperlihatkan bahwa Politik Luar Negeri Indonesia masih rapuh. Pemimpin-pemimpin Indonesia belum memberikan perhatian besar pada Politik Luar Negeri. Pada waktu kemerdekaan bangsa diproklamirkan, Politik Luar Negeri merupakan suatu wilayah diskursus yang banyak dikenal, yang oleh Rosihan Anwar diistilahkan dengan sebutan “terra incognita” (Wuryandari, 2008).

Indonesia Tahun 1956 Konstituante tidak berhasil merumuskan Undang-Undang Dasar baru. Keadaan itu semakin mengguncangkan situasi politik di Indonesia. Bahkan, masing-masing partai politik mementingkan kepentingan partai demi tujuan partainya tercapai. Oleh sebab itu, sejak tahun 1956 kondisi dan situasi politik Negara Indonesia semakin buruk dan kacau. Keadaan yang semakin bertambah kacau itu sangat membahayakan dan mengancam keutuhan Negara dan bangsa Indonesia karena selain Konstituante gagal menetapkan UUD yang baru juga timbulnya berbagai pemberontakan di

Indonesia yaitu: DI/TI di Jawa Barat, Aceh dan Sulawesi Selatan, Permesta di Sulawesi Utara, PRRI di Sumatera dan RMS di Maluku. banyak Suasana semakin bertambah panas karena adanya ketegangan yang diikuti dengan sikap dari setiap partai politik yang berada di Konstituante. Rakyat sudah tidak sabar lagi dan menginginkan agar pemerintah mengambil tindakan yang bijaksana untuk mengatasi kemacetan sidang Konstituante namun konstituante ternyata tidak dapat diharapkan lagi.

Kegagalan Konstituante untuk melaksanakan sidang-sidangnya untuk membuat undang-undang dasar baru. Undang-Undang Dasar yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pemerintahan Negara belum berhasil dibuat, sedangkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950) dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal dianggap tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, beberapa tokoh partai politik diantaranya Soewirjo ketua umum PNI mengajukan usul kepada Presiden Soekarno agar mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945 dan pembubaran Konstituante. Waktu itu pemberlakuan kembali Undang-undang Dasar 1945 dianggap sebagai langkah terbaik untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Oleh karena itu, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang berisi sebagai berikut: (1) Pembubaran Konstituante. (2) berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950, (3) Pembentukan MPRS Revolusi politik di Indonesia pada masa itu bukan mendirikan kekuatan segolongan atasan saja juga tidak mendirikan kekuasaan diktatorial kaum proletar, tapi harus mendirikan kekuasaan gotong-royong, kekuasaan menerapkan demokrasi yang menjamin terkonsentrasinya seluruh kekuatan nasional, seluruh kekuatan rakyat (Abdulgani, 2001).

Menurut Irham (2019) bahwa Pada masa itu diberlakukan politik konfrontasi yang diarahkan pada Negara-Negara kapitalis, seperti Negara-Negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Politik konfrontasi dilandasi oleh pandangan tentang Nefo (New Emerging Forces) dan Oldefo (Old Established Forces). Nefo merupakan kekuatan baru yang sedang muncul yaitu Negara-Negara progresif revolusioner (termasuk Indonesia dan Negara-Negara kornunis umumnya) yang anti imperialisme dan kolonialisme. Sedangkan Oldefo merupakan kekuatan lama yang telah mapan yakni Negara-Negara

kapitalis yang neokolonialis dan imperialis (Nekolim).



Gambar 1. Gerakan Militer G30S PKI Pada Fase Karatina Presiden

Perwujudan poros anti imperialisme dan kolonialisme itu dibentuk poros Jakarta -Phnom Penh - Hanoi - Peking - Pyong Yang. Akibatnya ruang gerak diplomasi Indonesia di forum internasional menjadi sempit, karena berkiblat ke negara-Negara komunis. Selain itu, pemerintah juga menjalankan politik konfrontasi dengan Malaysia. Hal ini disebabkan pemerintah tidak setuju dengan pembentukan Negara federasi Malaysia yang dianggap proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan Indonesia dan Negara-Negara blok Nefo. Para pemimpin PKI, Aidit, Njoto, dan lain-lain yang menuliskan statemen politik mereka dalam slogan-slogan Demokrasi Terpimpin dan menegaskan sikap mendukung Manipol juga harus mendukung Nasakom dan Resopim. Keadaan sosial-politik massa Demokrasi Terpimpin yang lebih condong ke kiri akibat unsur-unsur PKI yang amat kental. Oleh karenanya yang menjadi obyek jargon-jargon perjuangannya adalah BTI (Barisan Tani Indonesia). BTN adalah organisasi massa petani yang terhubung ke Partai Komunis Indonesia (PKI). Solehudin dan Kasdi (2015) memberikan penjelasan bahwa: Tujuan memberikan Blow up secara besar-besaran selain untuk menarik perhatian dan dukungan sosial-politik, juga menjadi propaganda misi perjuangan PKI. Kasus-kasus aksi sepihak di Jengkol, Kediri (1961), HMI-Utrecht di Jember (1963), kasus Manikebu (1963-1964), kasus Kanigoro, Kras , Kediri (1965) dan masih banyak lagi. Indonesia yang akan dijadikan Negara Komunis lewat berbagai macam cara seperti Landreform telah menimbulkan

gesekan dan benturan politik, social, budaya dan militer antara sepanjang tahun 1959 dan 1965. Landreform yang dimanfaatkan kaum komunis dengan srategi tidak lepas dari doktrin partai komunis.

Jalan revolusi dengan melenyapkan kelompok-kelompok masyarakat yang dianggap lawan. Untuk itu mereka ciptakan kelompok bagi teman seperjuangannya, dan lawan bagi yang dianggap sebagai musuh. Di lain pihak PKI memanfaatkan betul kampanye perebutan kembali Irian Barat yang mencapai puncaknya pada 1961-1962 pada penekanan yang terkandung dalam konsep-konsep yang berfungsi menjustifikasi pada kampanye untuk membangkitkan antusiasme publik. Slogan yang digunakan Soekarno pada pidato 13 Desember 1961, menyerukan rakyat menggagalkan pembentukan Negara merdeka Papua, bersiap mengibarkan bendera merah-putih di tanah Irian Barat dan menyiapkan diri bagi mobilisasi umum dengan semboyan Trikora.

Atas dasar Trikora tersebut maka dimulailah konfrontasi Indonesia terhadap Belanda dalam membebaskan Irian Barat yang pada tanggal 2 Januari 1962 dibentuklah Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Hingga akhir tahun 1962 Komando Mandala cukup berhasil melakukan konfrontasi di Irian Barat. Kesatuan menjadi kunci penting keberhasilan konfrontasi pembebasan Irian Barat sehingga dapat mendudukkan dan mengembangkan penguasaan wilayah dengan membawa serta rakyat Irian Barat. Perjuangan konfrontasi ini hingga awal tahun 1963 telah memulai fase eksploitasi sehingga mampu menduduki pos-pos pertahanan musuh yang penting. Menurut Liana (2018) bahwa:

Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin juga terlihat dari konfrontasinya terhadap Malaysia. Malaysia yang mulai melakukan upaya-upaya kolonialisme di wilayah Asia Tenggara dengan upaya pembentukan Negara Federasi Malaysia. Hubungan antara Indonesia dan Malaysia menjadi terganggu Indonesia berpendirian bahwa gagasan Federasi Malaysia merupakan proyek Neokolonialis Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia.

Usaha-usaha diplomasi yang tidak membuahkan hasil sejak April 1963 yang diprakarsai oleh Filipina untuk meredakan ketegangan Indonesia dan Filipina hingga di tengah-tengah kemacetan diplomasi tahun 1964 P residen

Soekarno pada tanggal 3 Mei 1964 mengucapkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora). Usaha kekuatan militer akhirnya digalakkan demi tujuan Politik Luar Negeri Indonesia yang menginginkan penghapusan imperialisme dan kolonialisme di dunia terutama dalam hal ini menghadapi neo-kolonialisme Malaysia.

Masa pemerintahan Orde Lama tidak bisa dilepaskan terhadap dua model pemerintahan yang dijalankan pada waktu itu yakni Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin. Demokrasi liberal sendiri merupakan sistem pemerintahan yang dimana kepala pemerintahannya di pimpin oleh perdana menteri sedangkan presiden hanya bertanggung jawab sebagai kepala Negara. Sedangkan Demokrasi terpimpin merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan sekaligus kepala Negara di pegang oleh seorang Presiden. Beralihnya sistem pemerintahan Indonesia dari sistem pemerintahan parlementer ke sistem pemerintahan Demokrasi terpimpin mengakibatkan semua kebijakan dipusatkan pada pemimpin Negara dalam hal ini Presiden Republik Indonesia yaitu Soekarno. Hal ini mengakibatkan presiden Soekarno lebih aktif dalam Politik Luar Negeri Indonesia. Kemudian tidak bisa di lepaskan keadaan politik dalam negeri Indonesia dengan adanya Gerakan 30 September 1965 (Kusumaningtyas, 2013).

Kondisi Politik Luar Negeri pada orde lama menemui beberapa masalah karena pemerintah orde lama melakukan konfrontasi dan keluarnya Indonesia dari PBB karena faktor anti imperialisme pemerintahan Orde Lama. Hal ini membuat Indonesia pada masa pemerintahan Orde Lama semakin dijauhi di dunia internasional.



Gambar 2. Masa Demokrasi Terpimpin menjadikan Bangsa Indonesia keluar dari anggota PBB pada tanggal 7 Januari 1965 (ilustrasi foto/Elshinta.com)

Konfrontasi dengan Malaysia merupakan awal mula permusuhan kedua Negara ini yakni adanya perbedaan ideologi politik antara kedua Negara tersebut dimana Indonesia cenderung anti-barat sedangkan Malaysia cenderung pro-barat. Selain dari pada itu, pada waktu itu pemerintah Indonesia juga mendapatkan tuduhan dari Tengku Abdul Rahman sebagai bagian sendiri dari pemberontakan yang dilakukan oleh Azahari di Kalimantan Utara pada tanggal 8 Desember 1962, yang pada waktu Azahari di Manila melakukan proklamasi dan mendeklarasikan dirinya sebagai seorang perdana menteri Kalimantan Utara dengan wilayah Brunai, Sarawak dan Sabah. Terkait dengan adanya tuduhan tersebut Ketua Umum PNI, Ali Sastroamidjojo memberikan reaksi dengan membantah tuduhan tersebut. Hal ini membuat kemarahan dari Tengku Abdul Rahman yang kemudian mengeluarkan pernyataan kepada Presiden Soekarno yakni jangan campuri urusan Kalimantan Utara (SN, 2009).

Selain dari pada itu pembentukan Negara Malaysia membuat Presiden Soekarno kembali merasa curiga, bahwa pembentukan Negara tersebut merupakan usaha yang dilakukan kekuatan neokolonialisme untuk mengepung Indonesia. Dimana kecurigan tersebut didasari pada pandangan Presiden Soekarno terhadap Indonesia sebuah Nefo akan di kepung oleh kekuatan Oldefo. Hal ini didasari pada posisi Indonesia sendiri yang di mana sebelah utaranya berbatasan dengan Malaysia.

Pada sekitar tahun 1960an tepatnya mulai dari tahun 1959 setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan oleh Soekarno hingga masa demokrasi terpimpin berakhir di tahun 1965, kebijakan luar negeri Indonesia dibawah Presiden Soekarno mengalami perubahan luar biasa yakni kebijakan yang semula tidak bersifat militan atau cenderung diplomasi berubah menjadi sebuah kebijakan perjuangan yang bersifat militan atau konfrontasi dalam melawan imperialisme, kolonialisme, dan khususnya neo-kolonialisme (Irhamna, 2020).

Pada zaman demokrasi terpimpin ini juga Soekarno mengatakan bahwa terdapat dua kekuatan yang ada pada saat itu, yaitu OLDEFOS dan NEFOS. OLDEFOS atau Old Established Forces berarti suatu kekuatan yang bersifat mengeksploitasi banyak sumber daya khususnya ekonomi, contohnya Negara-Negara penjajah seperti Inggris dan Belanda, sedangkan yang dimaksud NEFOS itu ialah New Emerging Forces atau bisa disebut kekuatan baru, pihak yang tergolong dalam NEFOS ini ialah salah satunya Indonesia dan Negara-Negara yang baru merdeka. Soekarno mengatakan bahwa Negara-Negara yang tergolong dalam NEFOS harus tetap berjuang agar mendapatkan kemerdekaan secara sempurna (Kusumaningtyas, 2013).

Soekarno pada saat itu merupakan pengaruh paling besar atas kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan Soekarno pada saat itu sangat bersifat militan dan konfrontatif melawan barat yaitu dimulai dari kebijakan melawan Belanda dalam merebut Irian, melawan Inggris yaitu saat berdirinya Federasi Malaya pada tahun 1963. Soekarno mengatakan bahwa sistem eksploitatif harus segera berubah sebelum Indonesia dapat berkembang secara ekonomi (Irhamna, 2020).

Kebijakan-kebijakan luar negeri militan Soekarno sama sekali tidak menyoal Negara-Negara komunis, hal ini dapat dibuktikan dari Soekarno meminta bantuan kepada Uni Soviet dalam konfrontasi dengan Malaysia dan meminta bantuan lebih khususnya dalam bidang ekonomi kepada mereka dan puncaknya yaitu saat Indonesia semakin mendekati Cina pada tahun 1964-1965. Sikap Soekarno yang hanya reaktif kepada barat namun tidak kepada timur itu sangat berbeda dengan pernyataan Jenderal Ahmad Yani pada 1965 yaitu ancaman utama Indonesia berasal dari utara yang berarti Cina, namun lagi-lagi Soekarno membantah dengan mengatakan bahwa ancaman datang dari semua arah. Dalam demokrasi terpimpin ini, banyak hal yang mendasari

Soekarno dalam kebijakan-kebijakannya, antara lain pada saat melawan Belanda dalam merebut Irian.

Pada awalnya Perdana Menteri Belanda sudah mengajukan kebijakan kepada sidang umum PBB yaitu berupa *The Luns Plan* yang berisi bahwa sudah saatnya mempertimbangkan Belanda untuk mundur dari Irian dan mengakhiri kedaulatannya, dan digantikan oleh pemerintahan dari PBB dan membentuk suatu komisi studi. Namun salah satu tokoh di Amerika mengatakan bahwa rencana memberi PBB administrasi dan membentuk komisi tersebut malah dapat membuat Uni Soviet semakin menyetir Indonesia. Tapi pada akhirnya *The Luns Plan* ini tetap gagal, namun ketika ini gagal Komisi Papua yang sebelumnya setuju dengan *The Luns Plan* pada 1 Desember 1961 malah mengubah nama menjadi Papua Barat dan sudah mengibarkan bendera sendiri berdampingan dengan bendera Belanda, melihat ini Soekarno geram dan mengerahkan rakyat Indonesia dalam aksi melawan hal tersebut yaitu dengan gerakan TRIKORA yang bertujuan untuk memobilisasi masyarakat Indonesia dalam membebaskan Papua (Arifin dkk, 2020).

Sama halnya dengan gerakan Soekarno dalam merebut Irian, tindakan Soekarno dalam mengganyang Malaysia didasari oleh pemikirannya yang sangat anti terhadap neo kolonialisme. Gerakan Ganyang Malaysia ini disebabkan oleh rencana pembentukan Federasi Malaya yang didalamnya akan tergabung juga Sabah, Sarawak, dan juga Brunei. Bung Karno sangat menentang hal tersebut dan ia berkata bahwa pembentukan ini merupakan cikal bakal neo-kolonialisme Inggris di Asia. Rakyat dan tokoh-tokoh Malaysia sangat tidak setuju dengan pernyataan Bung Karno ini dan malah balik menjelekkan Indonesia hingga puncaknya yaitu saat rakyat Malaysia berdemonstrasi di depan KBRI Kuala Lumpur dengan menginjak-injak lambang Negara yaitu Garuda Pancasila, hal tersebut sangat membuat Soekarno geram dan melancarkan gerakan Ganyang Malaysia pada 27 Juli 1963 (Brunnel, 1966).

Selain kebijakan merebut Irian Barat dari tangan Belanda dan mengganyang Malaysia, Presiden Pertama Republik Indonesia juga membuat kebijakan lainnya yaitu membuat poros-poros seperti Nefos-Oldefos dan Jakarta-Peking. Soekarno mengusung ide Nefos-Oldefos yakni untuk membagi dunia menjadi dua bagian melalui penggalangan dukungan antara Negara-Negara di Asia, Afrika, Amerika Latin, maupun Eropa Selatan yang baru merdeka untuk terlepas dari jeratan imperialisme dan kolonialisme, dan juga neo-kolonialisme

bangsa barat atau Oldefos yang masih menjadi ancaman Negara-Negara yang baru merdeka tersebut, maka Soekarno mengistilahkan Negara – Negara yang merdeka dan masih berjuang untuk terbebas imperalisme dan kolonialisme tersebut sebagai New Emerging Forces (Weinstein, 1971). Poros Jakarta – Peking juga tidak terlepas dari peran Indonesia sebagai Negara yang melawan penjajahan gaya baru atau neokolonialisme. Soekarno mengusung poros ini sebagai salah satu poros yang terdepan yaitu disebabkan untuk mencari dukungan langsung dari Cina dalam proses konfrontasi terhadap Malaysia, hal ini dikarenakan Malaysia sendiri disokong langsung oleh Inggris sedangkan Indonesia belum memiliki dukungan atau backup dari Negara manapun.

Politik Luar Negeri RI pada masa Soekarno pada proses maupun akhirnya memang cenderung sangat mutlak terhadap keinginan Soekarno sendiri, bahwa yang Soekarno sangat inginkan ialah agar bangsa-bangsa yang baru merdeka dapat dijauhkan dari segala bentuk imperalisme, kolonialisme, maupun neo-kolonialisme (nekolim) yang dapat merusak tatanan bangsa yang baru merdeka tersebut pada perkembangannya, hubungan kedua Negara ini semakin memburuk dimana pada waktu itu pada tanggal 30 Januari 1963, Kamaruddin H Idris selaku Duta besar Malayasia untuk Indonesia untuk waktu yang tidak di tentukan di panggil kembali oleh pemerintah Malaysia (Sunarti, 2014). Pemutusan hubungan diplomatik merupakan bentuk dari ketidak senangan Pemerintah Indonesia terkait dengan pembentukan Federasi Malaya. Selain dari pada itu bentuk ketidak senangan terkait pembentukan Federasi Malaysia juga di respon oleh masyarakat Indonesia, dimana pada waktu itu terjadi demonstrasi berujung pada pembakaran gedung kedutaan Inggris dan Malaya di Indonesia.

Hal tersebut kemudian juga disusul dengan Deklarasi Federasi Malaysia pada tanggal 16 september 1963. Sehari setelah pendeklarasian tersebut indonesia juga mengambil tindakan pemutusan hubungan diplomatik dengan Negara Malaya (Arifin dkk, 2019). Konfrontasi menentang pembentukan Federasi Malaysia memasuki tingkatan perang. Presiden Soekarno pada tanggal 16 Mei 1964 mengeluarkan surat keputusan untuk pembentukan Komando Siaga untuk menyelenggarakan operasi-operasi militer dalam usaha mempertahankan wilayah Indonesia dan membantu perjuangan rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Serawak, Brunei, dan Sabbah dengan mempergunakan segala pasukan bersenjata maupun sukarelawan. Selain upaya militer upaya diplomasi juga

digalakkan secara bersamaan dengan melalui PBB namun. Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin dalam bidang ekonomi tidak lepas dari prinsip-prinsip ekonomi dalam negeri yaitu ekonomi terpimpin. Hubungan ekonomi Indonesia dengan pihak-pihak luar sangat diutamakan untuk mampu menjalin hubungan ekonomi internasional dengan Negara-Negara luar namun sebisa mungkin Indonesia mandiri dan tidak bergantung pada bangsa lain. Kusmayadi (2018) menjelaskan bahwa: Politik Luar Negeri dijalankan oleh Soekarno dilakukan demi kepentingan nasional.

Pada era pemerintahannya, kepentingan nasional utama bagi bangsa Indonesia adalah pengakuan akan kedaulatan politik dan pembentukan identitas bangsa (nation building). Kepentingan nasional tersebut diterjemahkan dalam suatu kebijakan luar negeri, tujuannya mencari dukungan juga pengakuan terhadap kedaulatan bangsa, serta untuk menunjukkan karakter bangsa Indonesia kepada Negara-Negara lain. Implementasi dari kepentingan nasional tersebut adalah melakukan hubungan bersama Negara-Negara di Asia-Afrika yang baru terbebas dari penjajahan. Kepentingan nasional untuk menunjukkan karakter adalah dengan menonjolkan karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa mandiri dan tidak bersedia ada di bawah tekanan bangsa lain. Oleh sebab itu, pada masa kepemimpinannya, Soekarno sangat menolak semua bentuk penindasan oleh Negara lain.

E. Segi Pedagogis

1. Kebijakan pemerintah dalam membangun hubungan diplomatik antar Negara perlu kita contoh sebagai warga Negara ataupun sebagai masyarakat. Manusia tidak dapat hidup sendiri melainkan dengan bantuan orang lain sehingga menjalin hubungan itu sangat penting.
2. Konsep Politik Luar Negeri pada dasarnya adalah adanya upaya saling membantu menghadapi penjajah. Dalam hal ini, saling membantu adalah sikap yang perlu kita teladani.